



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
INSPEKTORAT**

**LAPORAN REALISASI  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TRIWULAN II  
TAHUN 2025**

*"Nasudhaisa Kutumbakam"*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan dengan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan selesainya Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Dengan tersusunnya Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025 ini, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan tahun berikutnya pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Kami berharap penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja dan nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 1 Juli 2025  
Inspektur Daerah Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR.....   | i  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1  |
| 1.1 LATAR BELAKANG.....   | 1  |
| 1.2 LANDASAN HUKUM .....  | 2  |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....  | 5  |
| BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM /<br>KEGIATAN .....                                   | 7  |
| 2.1 ANGGARAN BELANJA .....  | 7  |
| 2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024 ..... | 10 |
| BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA<br>DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025 .....            | 19 |
| 3.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA (RENJA).....  | 19 |
| 3.2 KENDALA & SOLUSI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG<br>TELAH DITETAPKAN.....                              | 28 |
| 3.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT<br>KOTA DENPASAR TAHUN 2025 .....                      | 28 |
| 3.4 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN<br>INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025.....          | 30 |
| 3.5 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIWULAN II TA.<br>2025.....  | 31 |
| BAB IV PENUTUP.....   | 35 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, untuk mengoperasionalkan RKPD dan berupaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Inspektorat Kota Denpasar Menyusun Laporan Realisasi Renja. Penyusunan Realisasi Renja Inspektorat Kota Denpasar Triwulan II Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta menunjukkan capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan periode triwulanan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Realisasi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan realisasi pelaksanaan program kerja / kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang disusun berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 32);
23. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas tentang, realisasi IKU, realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Tujuan Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam pengawasan pemerintah daerah.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Evaluasi Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA & PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN**

Pada bab ini memuat anggaran belanja serta evaluasi capaian atas indikator kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan serta realisasi keuangan.

### **BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada bab ini memuat evaluasi renja, kendala & solusi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, evaluasi capaian indikator kinerja utama, evaluasi capaian indicator kinerja pembangunan serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan serta kaidah pelaksanaannya.

## BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN

### 2.1 ANGGARAN BELANJA

Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 memiliki 3 program, 10 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi menjadi program prioritas, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota merupakan program yang menunjang operasional kantor. Pagu dana per Triwulan II (Pergeseran IV) Tahun 2025 sebesar Rp. 35.670.451.301,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per Triwulan II (Pergeseran IV) Inspektorat Daerah Kota Denpasar**

| Uraian                            | Jumlah                    |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>BELANJA DAERAH</b>             | Rp.37.310.674.908         |
| <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>Rp.31.476.129.908</b>  |
| Belanja Pegawai                   | Rp22.820.107.688          |
| Belanja Barang dan Jasa           | Rp.8.656.022.220          |
| <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>Rp.5.834.545.000</b>   |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.2.549.045.000          |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp.3.200.000.000          |
| Belanja Modal Aset Lainnya        | Rp.85.500.000             |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>Rp. 37.310.674.908</b> |

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 alokasi anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perbandingan Anggaran Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar dengan APBD Kota Denpasar**

| No. | Jenis Kegiatan   | Anggaran Induk    | Pergeseran I      | Pergeseran II     | Pergeseran III    | Pergeseran IV        |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.  | Total Belanja APBD Pergeseran 2025                               | 3.590.924.704.365 | 3.590.924.704.365 | 3.591.015.904.365 | 3.591.015.904.365 | 3.591.015.904.365,00 |
| 2.  | Total Pagu Inspektorat Daerah Kota Denpasar                      | 39.237.206.784    | 40.118.116.523    | 35.670.451.301    | 35.670.451.301    | 37.310.674.908,00    |
|     | 2a. Anggaran Pegawai (Gaji dan Tunjangan)                        | 21.281.728.844    | 22.162.638.583    | 21.335.574.361    | 21.335.574.361    | 22.820.107.688,00    |
|     | 2b. Anggaran Diklat  | 5.280.834.000     | 5.280.834.000     | 3.280.834.000     | 3.280.834.000     | 3.280.834.000,00     |
|     | 2c. Anggaran Sarana dan Prasarana Rutin                          | 8.832.867.940     | 8.832.867.940     | 8.799.467.940     | 8.799.467.940     | 8.955.158.220,00     |
|     | 2d. Anggaran Program Pengawasan                                  | 3.841.776.000     | 3.841.776.000     | 2.254.575.000     | 2.254.575.000     | 2.254.575.000,00     |
| 3.  | Total Anggaran Pengawasan (2b+2c+2d)                             | 17.955.477.940    | 17.955.477.940    | 14.334.876.940    | 14.334.876.940    | 14.490.567.220,00    |
| 4.  | Persentase Anggaran Pengawasan terhadap APBD Kota Denpasar (3/1) | 0,50%             | 0,50%             | 0,40%             | 0,40%             | 0,40%                |

Pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah disebutkan “untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan

klasifikasi 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c) diatas Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja dan diatas Rp.15.000.000.000, (lima belas miliar);

Anggaran Induk Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 telah memenuhi amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dimana proporsi anggaran pengawasan adalah 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja APBD Kota Denpasar. Per triwulan II Tahun 2025 anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Denpasar terhadap APBD Kota Denpasar adalah 0,40% (nol koma empat puluh persen) dimana beberapa kegiatan mengalami dampak efisiensi yang menyebabkan kebutuhan anggaran pengawasan belum memadai dan tidak sesuai dengan amanat yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Pengawasan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, hal ini adalah implementasi atas tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## **2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025**

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja & keuangan Inspektorat Kota Denpasar sampai dengan 26 Maret 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Triwulan II TA. 2025**

| KODE REK.                  | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA   | TARGET TAHUN 2025 |                             | REALISASI SD TRIWULAN II TAHUN 2025 |                       | KET.  |
|----------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
|                            |   |   | KINERJA           | Rp (Anggaran Pergeseran IV) | KINERJA                             | Rp (per 30 Juni)      |   |
| 1                          | 2   | 3   | 4                 | 5                           | 6                                   | 7                     | 8   |
|                            | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                         |   |                   |                             |                                     |                       |   |
|                            | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>   |   |                   | 37.310.674.908              |                                     | <b>14,047,038,366</b> |   |
| 6.01.6.01.0.00.00 1.       | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> | <b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>         | <b>100 %</b>      | <b>35,056,099,908</b>       | <b>55%</b>                          | <b>14,047,038,366</b> |   |
|                            | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                       | <b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>    | <b>100%</b>       | <b>22,820,107,688</b>       | <b>50%</b>                          | <b>11,538,539,360</b> |   |
| 6.01.6.01.0.00.001.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN           | 94 Orang/ bulan   | 22,820,107,688              | 94 Orang/ bulan                     | 11,538,539,360        | Sampai dengan triwulan II gaji dan tunjangan semua pegawai dapat terpenuhi. |
|                            | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                    | <b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> | <b>100%</b>       | <b>3,280,834,000</b>        | <b>55%</b>                          | <b>721,966,348</b>    |   |

| KODE REK.                           | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR KINERJA   | TARGET TAHUN 2025 |                             | REALISASI SD TRIWULAN II TAHUN 2025 |                   | KET.   |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
|                                     |  |   | KINERJA           | Rp (Anggaran Pergeseran IV) | KINERJA                             | Rp (per 30 Juni)  |  |
| 1                                   | 2  | 3   | 4                 | 5                           | 6                                   | 7                 | 8  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.001.<br>2.05.09  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 94 orang          | 3,280,834,000               | 25 orang                            | 102,376,348       | Sampai dengan triwulan II pegawai yang terjadwal mengikuti diklat di triwulan II dapat mengikuti diklat dengan baik. |
|                                     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                | <b>100%</b>       | <b>849,723,980</b>          | <b>23%</b>                          | <b>42,038,900</b> |  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.001.<br>2.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket           | 18,249,000                  | 20%                                 | -                 | Instalasi penerangan sudah berfungsi dengan baik sampai dengan Triwulan II.  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.001.<br>2.06.02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                      | 1 Paket           | 124,625,500                 | 25%                                 | 12,623,000        | Peralatan dan perlengkapan kantor sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan II  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.001.<br>2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                 | 1 Paket           | 98,604,230                  | 20%                                 | -                 | Peralatan Rumah Tangga sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan II.  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.001.<br>2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                  | 2 Paket           | 144,788,250                 | 50%                                 | 26,529,750        | Dari target 2 paket, semua paket belanja aci-aci dan dekorasi sampai Triwulan II sudah terlaksana.                   |

| KODE REK.                    | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR KINERJA  | TARGET TAHUN 2025 |                             | REALISASI SD TRIWULAN II TAHUN 2025 |                  | KET.  |
|------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|
|                              |   |  | KINERJA           | Rp (Anggaran Pergeseran IV) | KINERJA                             | Rp (per 30 Juni) |   |
| 1                            | 2   | 3  | 4                 | 5                           | 6                                   | 7                | 8   |
| 6.01.6.01.0.00.001.2.06.05.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                            | 1 Paket           | 120,651,000                 | 20%                                 | -                | Kebutuhann cetak dan penggandaan sudah terpenuhi sampai Triwulan I.                               |
| 6.01.6.01.0.00.00 1.2.06.06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan         | 4 Dokumen         | 14,400,000                  | 25%                                 | 2,430,000        | Dari target 4 dokumen, 3 dokumen sudah terpenuhi setiap bulannya (Bali Post, Denpost, Nusa Bali). |
| 6.01.6.01.0.00.001.2.06.08.  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 4 Laporan         | 158,600,000                 | 25%                                 | 6,100,000        | Kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu sudah terpenuhi sampai Triwulan I.                            |
| 6.01.6.01.0.00.00 1.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                       | 1 Laporan         | 169,806,000                 | 25%                                 | 6,075,000        | Kebutuhan penyelenggaraan rapat sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan I.                         |
|                              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>100%</b>       | <b>2,261,045,000</b>        | <b>100%</b>                         | <b>-</b>         |   |
| 6.01.6.01.0.00.001.2.07.10   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 35 Unit           | 2,261,045,000               | 50%                                 | -                | Sampai dengan triwulan I beberapa pengadaan belanja modal sudah terlaksana.                       |

| KODE REK.                   | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET TAHUN 2025 |                             | REALISASI SD TRIWULAN II TAHUN 2025 |                    | KET.  |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
|                             |  |  | KINERJA           | Rp (Anggaran Pergeseran IV) | KINERJA                             | Rp (per 30 Juni)   |   |
| 1                           | 2  | 3  | 4                 | 5                           | 6                                   | 7                  | 8   |
|                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                 | <b>100%</b>       | <b>1,675,118,960</b>        | <b>100%</b>                         | <b>229,037,308</b> |   |
| 6.01.6.01.0.00.001.2.08.02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                   | 1 Laporan         | 196,800,000                 | 25%                                 | 33,155,092         | Pemenuhan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik sampai Triwulan I sudah terpenuhi.              |
| 6.01.6.01.0.00.001.2.08.03  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah laporan Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                         | 1 Laporan         | 112,560,000                 | 50%                                 | 19,500,000         | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan I. |
| 6.01.6.01.0.00.001.2.08.04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 1 Laporan         | 1,521,449,240               | 65%                                 | 488,335,540        | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sudah terpenuhi sampai dengan Triwulan I.             |
|                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                | <b>100%</b>       | <b>4,013,580,000</b>        | <b>48%</b>                          | <b>141,713,250</b> |   |
| 6.01.6.01.0.00.001.2.09.01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit            | 52,300,000                  | 50%                                 | 16,533,200         | Pemenuhan pemeliharaan kendaraan pimpinan sudah terpenuhi sampai Triwulan I.                |

| KODE REK.                           | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET TAHUN 2025       |                             | REALISASI SD TRIWULAN II TAHUN 2025 |                   | KET.  |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
|                                     |  |  | KINERJA                 | Rp (Anggaran Pergeseran IV) | KINERJA                             | Rp (per 30 Juni)  |   |
| 1                                   | 2  | 3  | 4                       | 5                           | 6                                   | 7                 | 8   |
| 6.01.6.01.<br>0.00.001.<br>2.09.02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya | 30 Unit                 | 438,780,000                 | 50%                                 | 113,097,700       | Pemenuhan pemeliharaan kendaraan operasional sudah terpenuhi sampai Triwulan I. |
| 6.01.6.01.<br>0.00.001.<br>2.09.11  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi        | 5 Unit                  | 3,522,500,000               | 45%                                 | 12,082,350        | Sampai dengan triwulan 1 pemeliharaan masih berproses.                          |
| 6.01.6.01.<br>0.00.00 2             | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>  | <b>Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP</b>  | <b>Level 3; Level 3</b> | <b>849,856,000</b>          | <b>51%</b>                          | <b>38,087,150</b> |   |
|                                     | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>   | <b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>  | <b>100%</b>             | <b>764,536,000</b>          | <b>48%</b>                          | <b>38,087,150</b> |   |
| 6.01.6.01.<br>0.00.002.<br>2.01.01  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 1 Laporan               | 511,857,000                 | 45%                                 | 5,121,700         | Pengawasan kinerja masih berjalan sampai dengan triwulan I.                     |
| 6.01.6.01.<br>0.00.002.<br>2.01.02. | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 1 Laporan               | 81,237,000                  | 47%                                 | -                 | -   |
| 6.01.6.01.<br>0.00.002.<br>2.01.03  | Reviu Laporan Kinerja  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   | 1 Laporan               | 9,823,500                   | 80%                                 | 2,296,626         | -   |

| KODE REK.                           | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET TAHUN 2025 |                            | REALISASI SD TRIWULAN II TAHUN 2025 |                  | KET.   |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
|                                     |   |  | KINERJA           | Rp (Anggaran Pegereran IV) | KINERJA                             | Rp (per 30 Juni) |  |
| 1                                   | 2   | 3  | 4                 | 5                          | 6                                   | 7                | 8  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.002.<br>2.01.04. | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  | 1 Laporan         | 111,377,000                | 55%                                 | 25,964,781       | -  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.002.<br>2.01.05  | Pengawasan Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa   | 1 Laporan         | 16,669,500                 | 10%                                 | 3,297,043        | -  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.002.<br>2.01.07  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen         | 33,572,000                 | 50%                                 | 1,425,000        | Monitoring tindaklanjut BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Bali, APIP sudah berjalan dengan baik. |
|                                     | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>  | <b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>  | <b>100%</b>       | <b>85,320,000</b>          | <b>55%</b>                          | <b>-</b>         |  |
| 6.01.6.01.<br>0.00.002.<br>2.02.01  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah   | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani   | 1 Laporan         | 14,182,000                 | 55%                                 | -                | Penanganan Penyelesaian Kruneq sudah berjalan dengan baik.                                     |
| 6.01.6.01.<br>0.00.002.<br>2.02.02  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 8 Laporan         | 71,138,000                 | 55%                                 | -                | -  |

| KODE REK.                   | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR KINERJA  | TARGET TAHUN 2025   |                             | REALISASI SD TRIWULAN II TAHUN 2025 |                  | KET.   |
|-----------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
|                             |  |  | KINERJA             | Rp (Anggaran Pergeseran IV) | KINERJA                             | Rp (per 30 Juni) |  |
| 1                           | 2  | 3  | 4                   | 5                           | 6                                   | 7                | 8  |
| 6.01.6.01.0.00.003.         | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                   | <b>Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan</b>                         | <b>70 %</b>         | <b>1,404,719,000</b>        | <b>43%</b>                          | <b>8,880,200</b> |  |
|                             | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b> | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b> | <b>100%</b>         | <b>48,846,000</b>           | <b>35%</b>                          | <b>2,315,000</b> |  |
| 6.01.6.01.0.00.003.2.01.01  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                  | Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun                      | 2 Rekomendasi       | 9,224,000                   | 50%                                 | 2,315,000        | -  |
| 6.01.6.01.0.00.003.2.01.02. | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                       | Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun           | 2 Rekomendasi       | 39,622,000                  | 20%                                 | -                | -  |
|                             | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>  | <b>Persentase Pendampingan dan Asistensi</b>   | <b>100%</b>         | <b>1,355,873,000</b>        | <b>50%</b>                          | <b>6,565,200</b> |  |
| 6.01.6.01.0.00.003.2.02.01  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                              | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 38 Perangkat Daerah | 67,928,000                  | 50%                                 | 900,000          | Pendampingan perangkat daerah sudah terlaksana dengan baik sampai dengan Triwulan I. |

| KODE REK.                   | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET TAHUN 2025   |                             | REALISASI SD TRIWULAN II TAHUN 2025 |                       | KET. |
|-----------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|
|                             |  |  | KINERJA             | Rp (Anggaran Pergeseran IV) | KINERJA                             | Rp (per 30 Juni)      |      |
| 1                           | 2  | 3  | 4                   | 5                           | 6                                   | 7                     | 8    |
| 6.01.6.01.0.00.003.2.02.02  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi                                | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 36 Perangkat Daerah | 51,907,000                  | 55%                                 | 5,665,200             | -    |
| 6.01.6.01.0.00.003.2.02.03. | Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi   | 4 Kegiatan          | 1,000,682,000               | 50%                                 | -                     | -    |
| 6.01.6.01.0.00.003.2.02.04  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas           | 36 Perangkat Daerah | 235,356,000                 | 50%                                 | -                     | -    |
| <b>TOTAL</b>                |  |  |                     | <b>37.310.674.908</b>       |                                     | <b>14.094.005.716</b> |      |

### BAB III

## EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025

### 3.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA (RENJA)

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Inspektorat Daerah sudah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 87 Tahun 2007 tentang pada Tabel T.E.1. halaman 495 disebutkan :

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | $91\% \leq 100\%$                | Sangat Tinggi                        |
| 2.  | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3.  | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |
| 4.  | $51\% \leq 65\%$                 | Rendah                               |
| 5.  | $\leq 50\%$                      | Sangat Rendah                        |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Realisasi kinerja sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar 50%. Sementara itu, Realisasi keuangan sampai Triwulan II Tahun 2025 sebesar

Rp. 14.094.005.716,- atau 37.77 % dari total anggaran sebesar Rp. 37.310.674.908,-. Berikut adalah seluruh program dan kegiatan yang dijabarkan pada tabel :

**Tabel 3.1 Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025**

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)  | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja pada triwulan |               |    |               |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |                | Capaian terhadap target tahun berjalan |    | Realisasi sd tahun berjalan |                | Capaian terhadap target akhir renstra |    |
|----|--|---|---|-----------------|--|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|---|----------------|--|----|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----|
|    |  |   | (Tahun 2021-2026)   |                 | (Tahun 2022-2024)  |                | (Tahun 2025)  |                | I                               |               | II |               | III |    | IV |    | 12 = 8+9+10+11  |                | 13 = 12/7x100%                         |    | 14 = 6+12                   |                | 15 = 14/5x100%                        |    |
|    |  |   | K   | Rp              | K  | Rp             | K   | Rp             | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp             | K                                      | Rp | K                           | Rp             | K                                     | Rp |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota            | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatian                                       | 100   | 127.639.512.185 | 100  | 61,041,265,222 | 100   | 35,056,099,908 | 29                              | 5,601,020,226 | 26 | 8,446,018,140 |     |    |    |    | 55  | 14.047.038.366 | 55                                     | 40 | 355                         | 75.088.303.588 | 80                                    | 59 |
|    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | 100   | 99.206.103.066  | 100  | 47,286,263,974 | 100   | 22,820,107,688 | 25                              | 5,159,353,870 | 25 | 6.379.185.490 |     |    |    |    | 50  | 11.538.539.360 | 50                                     | 51 | 350                         | 58.824.803.334 | 110                                   | 59 |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 100   | 99.188.122.941  | 100  | 47,280,263,974 | 100   | 22.820.107.5   | 25                              | 5,159,353,870 | 25 | 6.379.185.490 |     |    |    |    | 50  | 11.538.539.360 | 50                                     | 51 | 350                         | 58.818.803.334 | 70                                    | 59 |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Terpenuhinya kebutuhan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | 100   | 17.980.125      | 100  | 6,000,000      | -   | -              | -                               | -             | -  | -             |     |    |    |    | -   | -              | -                                      | -  | 300                         | 6,000,000      | 150                                   | 33 |
|    | Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | 100   | 8.520.018.335   | 100  | 2,789,784,608  | 100   | 3,280,834,000  | 25                              | 102,376,348   | 30 | 619,590,000   |     |    |    |    | 55  | 721,966,348    | 55                                     | 22 | 355                         | 2,892,160,956  | 65                                    | 34 |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100   | 8.520.018.335   | 100  | 2,789,784,608  | 100   | 3,280,834,000  | 25                              | 102,376,348   | 30 | 619,590,000   |     |    |    |    | 55  | 721,966,348    | 55                                     | 22 | 355                         | 2,892,160,956  | 65                                    | 41 |
|    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 100   | 4.715.442.037   | 100  | 2,249,561,753  | 100   | 849,723,980    | 23                              | 42,038,900    | 22 | 143,822,714   |     |    |    |    | 45  | 185,861,614    | 45                                     | 22 | 345                         | 2,435,423,367  | 69                                    | 52 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 100   | 53.584.646      | 100  | 33,205,497     | 100   | 18,249,000     | 20                              | -             |    |               |     |    |    |    | 20  | -              | 20                                     | -  | 320                         | 33,205,497     | 64                                    | 62 |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) |               | Realisasi Kinerja pada triwulan |            |    |                     |    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Capaian terhadap target tahun berjalan |    | Realisasi sd tahun berjalan |               | Capaian terhadap target akhir renstra |    |
|----|---|--|---|---------------|--|-------------|--|---------------|---------------------------------|------------|----|---------------------|----|----|----|----|---|-------------|--|----|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|----|
|    |   |  | 5   |               | 6  |             | 7  |               | 8                               |            | 9  |                     | 10 |    | 11 |    | 12 = 8+9+10+11  |             | 13 = 12/7x100%                         |    | 14 = 6+12                   |               | 15 = 14/5x100%                        |    |
|    |   |  | K   | Rp            | K  | Rp          | K  | Rp            | K                               | Rp         | K  | Rp                  | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp          | K                                      | Rp | K                           | Rp            | K                                     | Rp |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor yang disediakan              | 100   | 913.950.345   | 100  | 761,769,820 | 100  | 124,625,500   | 25                              | 12,623,000 |    |                     |    |    |    |    | 25  | 12,623,000  | 25                                     | 10 | 325                         | 774,392,820   | 65                                    | 85 |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                | 100   | 120.944.414   | 100  | 69,769,575  | 100  | 98,604,230    | 20                              | -          |    |                     |    |    |    |    | 20  | -           | 20                                     | 0  | 320                         | 69,769,575    | 64                                    | 58 |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                 | 100   | 625.456.194   | 100  | 304,808,000 | 100  | 144,788,250   | 25                              | 14,810,900 | 25 | 11.7<br>18.8<br>50  |    |    |    |    | 50  | 26,529,750  | 50                                     | 18 | 350                         | 331,337,750   | 70                                    | 53 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 100   | 517.265.444   | 100  | 271,258,788 | 100  | 120,651,000   | 20                              | -          | 40 | 15.6<br>28.8<br>00  |    |    |    |    | 60  | 15,628.800  | 60                                     | 13 | 360                         | 286,887,588   | 72                                    | 55 |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan       | 100   | 226.160.006   | 100  | 47,010,500  | 100  | 14,400,000    | 25                              | 2,430,000  | 25 | 2.43<br>0.00<br>0   |    |    |    |    | 50  | 4,860,000   | 50                                     | 34 | 350                         | 51,870,500    | 70                                    | 23 |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 100   | 934.966.500   | 100  | 476,215,000 | 100  | 158,600,000   | 25                              | 6,100,000  | 35 | 83.9<br>00.0<br>00  |    |    |    |    | 60  | 90,000,000  | 60                                     | 57 | 360                         | 566,215,000   | 72                                    | 61 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 100   | 1.323.114.488 | 100  | 285,524,573 | 100  | 169,806,000   | 25                              | 6,075,000  | 50 | 30.1<br>45.0<br>64  |    |    |    |    | 75  | 36,220,064  | 75                                     | 21 | 375                         | 321,744,637   | 75                                    | 24 |
|    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 100   | 3.291.153.821 | 100  | 973,216,426 | 100  | 2,261,045,000 | 50                              | -          | 25 | 886.<br>214.<br>000 |    |    |    |    | 70  | 886.214.000 | 75                                     | 39 | 375                         | 1.859.430.426 | 75                                    | 56 |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) |               | Realisasi Kinerja pada triwulan |             |    |             |    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Capaian terhadap target tahun berjalan |    | Realisasi sd tahun berjalan |               | Capaian terhadap target akhir renstra |    |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|----|----|----|----|---|-------------|--|----|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|----|
|    |  |  | 5   |               | 6  |               | 7  |               | 8                               |             | 9  |             | 10 |    | 11 |    | 12 = 8+9+10+11  |             | 13 = 12/7x100%                         |    | 14 = 6+12                   |               | 15 = 14/5x100%                        |    |
|    |  |  | K   | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp          | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp          | K                                      | Rp | K                           | Rp            | K                                     | Rp |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan          | 100   | 3.291.153.821 | 100  | 973,216,426   | 100  | 2,261,045,000 | 50                              | -           | 25 | 886.214.000 |    |    |    |    | 75  | 886.214.000 | 75                                     | 39 | 375                         | 1.859.430.426 | 75                                    | 56 |
|    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 100   | 7.966.990.157 | 100  | 4,154,545,792 | 100  | 1.830.809.240 | 25                              | 229,037,308 | 30 | 343.706.486 |    |    |    |    | 55  | 572,743,794 | 55                                     | 31 | 355                         | 4,727,289,586 | 77                                    | 59 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100   | 613.122.263   | 100  | 374,006,511   | 100  | 196,800,000   | 25                              | 33,155,092  | 25 | 31.733.162  |    |    |    |    | 50  | 64,888,254  | 50                                     | 33 | 350                         | 438,894,765   | 70                                    | 72 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 100   | 321.948.704   | 100  | 148,286,650   | 100  | 112,560,000   | 25                              | -           | 25 | 19.500.000  |    |    |    |    | 50  | 19.500.000  | 50                                     | 17 | 350                         | 167,786,650   | 88                                    | 52 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                   | 100   | 7.031.919.190 | 100  | 3,632,252,631 | 100  | 1,521,449,240 | 25                              | 195,882,216 | 40 | 292.473.324 |    |    |    |    | 65  | 488,355,540 | 65                                     | 32 | 365                         | 4,120,608,171 | 73                                    | 59 |
|    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 100   | 3.939.804.769 | 100  | 3,587,892,669 | 100  | 4,013,580,000 | 25                              | 68,213,800  | 23 | 73.499.450  |    |    |    |    | 48  | 141.713.250 | 48                                     | 4  | 348                         | 3,729.605,919 | 75                                    | 95 |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)                       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) |               | Realisasi Kinerja pada triwulan |            |    |            |    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Capaian terhadap target tahun berjalan |    | Realisasi sd tahun berjalan |               | Capaian terhadap target akhir renstra |     |
|----|--|--|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|------------|----|------------|----|----|----|----|---|-------------|--|----|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|
|    |  |  | 5   |               | 6  |               | 7  |               | 8                               |            | 9  |            | 10 |    | 11 |    | 12 = 8+9+10+11  |             | 13 = 12/7x100%                         |    | 14 = 6+12                   |               | 15 = 14/5x100%                        |     |
|    |  |  | K   | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K                               | Rp         | K  | Rp         | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp          | K                                      | Rp | K                           | Rp            | K                                     | Rp  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 100   | 173.279.199   | 100  | 89,996,600    | 100  | 52,300,000    | 25                              | 7,500,000  | 25 | 9.033.200  |    |    |    |    | 50  | 16.533.200  | 50                                     | 32 | 350                         | 106.529.800   | 70                                    | 61  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 100   | 2.089.380.570 | 100  | 867,205,250   | 100  | 438,780,000   | 25                              | 60,713,800 | 25 | 52.383.900 |    |    |    |    | 50  | 113.097.700 | 50                                     | 26 | 350                         | 980,302,950   | 70                                    | 47  |
|    | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100   | 1.677.145.000 | 100  | 2,630,690,819 | 100  | 3,522,500,000 | 25                              | -          | 20 | 12.082.350 |    |    |    |    | 45  | 12.082.350  | 45                                     | 0  | 345                         | 2,642,773,169 | 86                                    | 158 |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pengawasan   | Maturitas SPIP Kapabilitas APIP  | 100   | 1.690.900.175 | 275  | 1,001,760,573 | 100  | 849.856.000   | 20                              | 1,350,000  | 32 | 36.737.150 |    |    |    |    | 51  | 38.087.150  | 51                                     | 4  | 876                         | 1,039,847,723 | 71                                    | 61  |
|    | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal   | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal   | 100   | 1.273.138.388 | 350  | 830,326,167   | 100  | 764,536,000   | 19                              | 1,350,000  | 29 | 36.737.150 |    |    |    |    | 48  | 38,087,150  | 48                                     | 5  | 1098                        | 868,413,317   | 76                                    | 68  |
|    | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 100   | 81.557.793    | 100  | 135,388,000   | 100  | 511,857,000   | 20                              | 1,350,000  | 25 | 3.771.700  |    |    |    |    | 45  | 5.121.700   | 45                                     | 1  | 245                         | 140.509.700   | 61                                    | 172 |
|    | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 100   | 106.994.045   | 100  | 49,475,750    | 100  | 81,237,000    | 25                              | -          | 22 | -          |    |    |    |    | 47  | -           | 47                                     | 0  | 247                         | 49,475,750    | 62                                    | 46  |
|    | Reviu Laporan Kinerja  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   | 100   | 109.876.970   | 100  | 22,629,500    | 100  | 9,823,500     | 20                              | -          | 60 | 2.296.626  |    |    |    |    | 80  | 2.296.626   | 80                                     | 23 | 280                         | 24,926,126    | 70                                    | 23  |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) |               | Realisasi Kinerja pada triwulan |           |    |                    |    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |            | Capaian terhadap target tahun berjalan |    | Realisasi sd tahun berjalan |               | Capaian terhadap target akhir renstra |    |
|----|---|--|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|----|--------------------|----|----|----|----|---|------------|--|----|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|----|
|    |   |  | 5   |               | 6  |               | 7  |               | 8                               |           | 9  |                    | 10 |    | 11 |    | 12 = 8+9+10+11  |            | 13 = 12/7x100%                         |    | 14 = 6+12                   |               | 15 = 14/5x100%                        |    |
|    |   |  | K   | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K                               | Rp        | K  | Rp                 | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp         | K                                      | Rp | K                           | Rp            | K                                     | Rp |
|    | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  | 100   | 95.487.561    | 100  | 37,759,900    | 100  | 111,377,000   | 25                              | -         | 30 | 25.9<br>64.7<br>81 |    |    |    |    | 55  | 25.964.781 | 55                                     | 23 | 255                         | 63,724,681    | 64                                    | 67 |
|    | Pengawasan Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa   | 100   | 92.836.080    | 100  | 21,003,750    | 100  | 16,669,500    | -                               | -         | 10 | 3.27<br>9.04<br>3  |    |    |    |    | 10  | 3.279.043  | 10                                     | 20 | 210                         | 24,282,793    | 53                                    | 26 |
|    | Kerjasama Pengawasan Internal   | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk  | 100   | 555.652.988   | 100  | 477,956,826   | 100  |               | -                               | -         | -  |                    |    |    |    |    | 0   | -          | 0                                      | 0  | 300                         | 477,956,826   | 150                                   | 86 |
|    | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100   | 230.732.951   | 100  | 86,112,441    | 100  | 33,572,000    | 25                              | -         | 25 | 1.42<br>5.00<br>0  |    |    |    |    | 50  | 1.425.000  | 50                                     | 4  | 350                         | 87.537.441    | 70                                    | 38 |
|    | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 100   | 417.761.787   | 200  | 171,434,406   | 100  | 85,320,000    | 20                              | -         | 35 |                    |    |    |    |    | 55  | -          | 55                                     | 0  | 625                         | 171,434,406   | 67                                    | 41 |
|    | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah   | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani   | 100   | 79.843.318    | 100  | 16,172,000    | 100  | 14,182,000    | 20                              | -         | 35 |                    |    |    |    |    | 55  | -          | 55                                     | 0  | 255                         | 16,172,000    | 64                                    | 20 |
|    | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 100   | 337.918.469   | 100  | 155,262,406   | 100  | 71,138,000    | 20                              | -         | 35 |                    |    |    |    |    | 55  | -          | 55                                     | 0  | 355                         | 155,262,406   | 71                                    | 46 |
| 3  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi   | Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan  | 100   | 1.561.672.977 | 200  | 1,209,066,823 | 100  | 1,404,719,000 | 24                              | 3,215,000 | 19 | 5.66<br>5.20<br>0  |    |    |    |    | 43  | 8.880.200  | 43                                     | 1  | 643                         | 1,217,947,023 | 65                                    | 78 |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)                          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) |               | Realisasi Kinerja pada triwulan |           |    |           |    |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |           | Capaian terhadap target tahun berjalan |    | Realisasi sd tahun berjalan |               | Capaian terhadap target akhir renstra |    |
|----|--|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|----|-----------|----|----|----|----|---|-----------|--|----|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|----|
|    |  |   | 5   |               | 6  |               | 7  |               | 8                               |           | 9  |           | 10 |    | 11 |    | 12 = 8+9+10+11  |           | 13 = 12/7x100%                         |    | 14 = 6+12                   |               | 15 = 14/5x100%                        |    |
|    |  |   | K   | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp            | K                               | Rp        | K  | Rp        | K  | Rp | K  | Rp | K   | Rp        | K                                      | Rp | K                           | Rp            | K                                     | Rp |
| 1  | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                        | 100   | 171.386.551   | 100  | 74,044,643    | 100  | 48,846,000    | 23                              | 2,315,000 | 13 | -         |    |    |    |    | 35  | 2,315,000 | 35                                     | 5  | 335                         | 76,359,643    | 67                                    | 45 |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                    | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun                                       | 100   | 55.072.523    | 100  | 22,751,956    | 100  | 9,224,000     | 25                              | 2,315,000 | 25 | -         |    |    |    |    | 50  | 2,315,000 | 50                                     | 25 | 350                         | 25,066,956    | 70                                    | 46 |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun                            | 100   | 116.314.028   | 100  | 51,292,687    | 100  | 39,622,000    | 20                              | -         | -  | -         |    |    |    |    | 20  | -         | 20                                     | 0  | 320                         | 51,292,687    | 64                                    | 44 |
|    | Pendampingan dan Asistensi   | Persentase Pendampingan dan Asistensi   | 100   | 1.390.286.426 | 100  | 1,135,022,180 | 100  | 1,355,873,000 | 25                              | 900,000   | 26 | 5.665.200 |    |    |    |    | 51  | 6.565.200 | 51                                     | 0  | 251                         | 1.141.587.380 | 63                                    | 82 |
|    | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                                | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                | 100   | 148.605.586   | 100  | 36,277,880    | 100  | 67,928,000    | 25                              | 900,000   | 25 | -         |    |    |    |    | 50  | 900,000   | 25                                     | 1  | 250                         | 37,177,880    | 663                                   | 25 |
|    | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi             | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 100   | 123.738.579   | 100  | 43,068,060    | 100  | 51,907,000    | 25                              | -         | 30 | 5.665.200 |    |    |    |    | 55  | 5.665.200 | 55                                     | 11 | 255                         | 48,733,260    | 64                                    | 39 |

| No  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)                        | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) (Tahun 2021-2026) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (Tahun 2022-2024) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) |               | Realisasi Kinerja pada triwulan |    |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |                   | Capaian terhadap target tahun berjalan |    | Realisasi sd tahun berjalan |               | Capaian terhadap target akhir renstra |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|-------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|---|-------------------|--|----|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   |   | K   | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp            | I                               |    | II |    | III |    | IV |    | 12 = 8+9+10+11  |                   | 13 = 12/7x100%                         |    | 14 = 6+12                   |               | 15 = 14/5x100%                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 3   | 4   | 5   |             | 6  |               | 7  |               | 8                               |    | 9  |    | 10  |    | 11 |    | 12 = 8+9+10+11  |                   | 13 = 12/7x100%                         |    | 14 = 6+12                   |               | 15 = 14/5x100%                        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | K   | Rp          | K  | Rp            | K  | Rp            | K                               | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp                | K                                      | Rp | K                           | Rp            | K                                     | Rp  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 100   | 973.990.500 | 100  | 1,016,766,100 | 100  | 1,000,682,000 | 25                              | -  | 25 | -  |     |    |    |    | 50  | -                 | 25                                     | 0  | 250                         | 1,016,766,100 | 63                                    | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas        | 100   | 143.951.761 | 100  | 38,910,140    | 100  | 235,356,000   | 25                              | -  | 25 | -  |     |    |    |    | 50  | -                 | 25                                     | 0  | 250                         | 38,910,140    | 63                                    | 27  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) :   |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    | 25  |                   |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM  |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |   | 37.310.674.908,00 |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH REALISASI DARI SELURUH PROGRAM   |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |   | 14.094.005.716,00 |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)  |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    | 50  | 37,77             |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) DENGAN CAPAIAN RENSTRA S.D TAHUN KE 3 TRIWULAN I   |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    | 72  |                   |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : perencanaan yang sudah terstruktur sehingga keberhasilan kinerja dapat dicapai dan evaluasi kendala dapat diprediksi.   |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |   |                   |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : padatnya penugasan mandatory dan wajib serta pemenuhan penyelenggaraan kegiatan dan pemenuhan kompetensi APIP yang menyebabkan penyelesaian penugasan terkendala waktu.. |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |   |                   |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **) : Menegaskan pembagian tugas dan dateline kepada masing-masing tim  |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |   |                   |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya **) : Perencanaan kinerja agar selalu disusun berdasarkan amanat untuk Jakwas APIP.   |   |   |   |             |  |               |  |               |                                 |    |    |    |     |    |    |    |   |                   |  |    |                             |               |                                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.2 KENDALA & SOLUSI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Dalam hal pelaksanaan pencapaian target kinerja, berikut kendala yang dialami Inspektorat Daerah Kota Denpasar :

- a. Beberapa kegiatan pengawasan terlaksana lebih lama dari waktu yang ditetapkan pada surat tugas karena bersamaan dengan penugasan *mandatory* lainnya (Diklat dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK) namun semuanya dapat terselesaikan tepat waktu.

Dalam menghadapi kendala tersebut, berikut solusi yang dilaksanakan :

- a. Menyusun jadwal pekerjaan rutin dan *mandatory* serta melakukan manajemen waktu secara maksimal, selain itu melakukan monitoring berkala di setiap penugasan yang diberikan.

### 3.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025

**Tabel 3.2 Capaian IKU Inspektorat Kota Denpasar**

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Kinerja sd Triwulan II | Ket.   |
|-----|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1   | Predikat SAKIP          | BB (78,35)                | -                                | Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah selesai melaksanakan Evaluasi SAKIP Internal dan akan melaksanakan penyerahan penghargaan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 atas implementasi Tahun 2024 pada tanggal 4 Juli 2025. |
| 2   | Opini BPK               | WTP                       | -                                | Sampai dengan TW II Opini BPK untuk pemeriksaan LKPD Kota Denpasar Tahun 2024 telah dirilis dengan laporan nomor : 73/LHP/XIX.DPS/05/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang diserahkan tanggal 5 Juni Tahun 2025 dan  |

| No. | Indikator Kinerja Utama                                     | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Kinerja sd Triwulan II | Ket.  |
|-----|---|---------------------------|----------------------------------|---|
|     |   |                           |                                  | Pemerintah Kota Denpasar raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 13 kalinya.   |
| 3   | Level Kapabilitas APIP                                      | Level 3                   | -                                | Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan II Tahun 2025 telah melaksanakan pemenuhan profil dan elemen Kapabilitas APIP pada portal BPKP : <a href="http://www.apip.bpkp.go.id">www.apip.bpkp.go.id</a>   |
| 4   | Level Maturitas SPIP  | Level 3                   | -                                | Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan maturitas SPIP Kota Denpasar, telah melaksanakan bimbingan teknis Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi dengan mendatangkan narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali. |
| 5   | Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan | 80%                       | 21%                              | Sampai dengan Triwulan II, pendampingan OPD telah dilaksanakan sesuai jadwal Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan sesuai kunjungan OPD yang memerlukan pendampingan tambahan ke Inspektorat Daerah Kota Denpasar.  |

### 3.4 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

**Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Inspektorat Kota Denpasar**

| No. | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target 2025 | Realisasi Kinerja sd Triwulan II | Ket.  |
|-----|---|-------------|----------------------------------|---|
| 1   | Persentase tindak lanjut temuan                     | 80%         | 98.32%                           | Data realisasi sd Semester I Tahun 2025 bersifat fluktuatif berdasarkan pada bertambahnya jumlah temuan maka mengakibatkan persentase tindak lanjut temuan berubah.       |
| 2   | Jumlah temuan BPK                                   | 13          | -                                | Data realisasi terdiri dari 2 Laporan Pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan LKPD dan Pemeriksaan Kinerja. Sampai dengan Triwulan II Pemeriksaan LKPD telah selesai dilaksanakan. |

### 3.5 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIWULAN II TA. 2025

#### Pendidikan dan Pelatihan Interpersonal Skill



Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD dan Indeks Inovasi Daerah (IID)



Sosialisasi Antikorupsi dan Program Pengendalian Gratifikasi di Sektor Pendidikan





## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar yang disusun sebagai implementasi dari Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan kegiatan, yang dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Laporan Evaluasi Rencana Kerja ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja pada Inspektorat Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 1 Juli 2025  
Inspektur Daerah Kota Denpasar,  
  
  
I. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001

